

berbagai permasalahan serta secara bersama dengan anggota kelompok mencari solusi yang tepat. Peran pemerintah kelurahan juga kurang lebih sama dengan PPL dalam hal menjadi fasilitator bagi kelompok tani apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan dengan pemerintah di tingkat lebih atas.

Pemberdayaan perempuan tani secara spesifik, memang belum dilakukan oleh pemerintah kelurahan Puuduria. Namun dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan PKK kelurahan melalui kelompok dasawisma, setidaknya dapat mempertahankan rasa kebersamaan, tanggung jawab, suka bekerja keras, kemandirian dari perempuan tani, yang telah terbina melalui wadah kelompok tani. Pemberdayaan perempuan tani melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan tersebut, disadari atau tidak, sudah merupakan salah satu bentuk dari upaya mempertahankan kemandirian sosialnya. Hal itu merupakan modal bagi perempuan tani dalam mencapai kemandirian ekonominya, pada saat mereka kembali pada rutinitasnya sebagai petani dalam kelompoknya.

### Kesimpulan

1. Pemberdayaan perempuan tani dalam kegiatan kelompok tani di kelurahan Puuduria lebih dominan pada tahapan pelaksanaan program kerja kelompok yang secara adil membagi tugas antara anggota kelompok laki-laki dan perempuan. Tahapan pelaksanaan program inilah yang berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi perempuan tani,

di mana semakin besarnya ruang dan kesempatan yang diberikan terhadap keterlibatan perempuan tani akan berdampak pada semakin besarnya peluang mereka untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kegiatan kelompok tani yang tetap konsisten membuat perempuan tani dapat mencapai kemandirian ekonominya walaupun masih pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, serta terbentuknya kemandirian sosial yang dengan indikator-indikator seperti adanya kebersamaan, suka bekerja keras, tidak mudah putus asa, memiliki disiplin kerja serta adanya komitmen kuat untuk melaksanakan berbagai keputusan kelompok sebaik-baiknya. Sedangkan untuk kemandirian politik dengan indikator keterlibatan perempuan tani dalam pengambilan keputusan kelompok, belum nampak pada perempuan tani di kelurahan Puuduria. Hal ini antara lain karena latar belakang pendidikan mereka yang umumnya rendah, serta adanya pola pikir (*mind set*) bahwa urusan pengambilan keputusan lebih dipercayakan kepada anggota laki-laki, yang umumnya adalah suami mereka sendiri.

2. Pemberdayaan yang terjadi bagi perempuan tani di kelurahan Puuduria, berdasarkan pentahapannya adalah tahap partisipatoris dan emansipatif. Berdasarkan pendekatannya, lebih cenderung pada pendekatan mobilisasi sosial (*social mobilization*), sedangkan berdasarkan tingkatannya (*empowerment set-*

ting) adalah pada tingkat mikro (individu) dan tingkat mezzo (kelompok).

3. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan tani dapat dikatakan belum ada. Kebijakan yang ada selama ini masih umum yang mengatur tentang sektor pertanian, serta mencapai tingkat kelompok tani saja. Pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan tani masih diarahkan pada kegiatan PKK Kabupaten Konawe hingga di tingkat desa/kelurahan, termasuk kelurahan Puuduria. Berkaitan dengan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan terhadap pemberdayaan perempuan tani, belum secara spesifik dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kebijakan dari pemerintah yang lebih tinggi sebagai acuannya. Namun, pembinaan dalam tingkat kelompok telah intensif dilakukan, sehingga secara tidak langsung sudah ikut memberdayakan perempuan tani, walaupun tentunya belum maksimal sebagaimana tuntutan suatu upaya pemberdayaan masyarakat secara utuh.

### Saran

1. Dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan perempuan tani yang merupakan anggota kelompok tani, maka pengurus kelompok tani di Kelurahan Puuduria disarankan agar dapat memberikan kesempatan kepada mereka terutama dalam hal pengambilan keputusan kelompok, baik pada tahapan perencanaan maupun evaluasi program. Jadi bukan hanya pada saat penentuan jenis

padi yang akan ditanam, namun juga mengenai hal-hal lain yang menyangkut program kerja kelompok.

2. Dalam rangka mempertahankan eksistensi perempuan tani yang ada di kelurahan Puuduria, maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe untuk melakukan upaya pemberdayaan dengan pendekatan *capacity building* (pembangunan kapasitas) melalui **dimensi peningkatan sumber daya manusia (SDM)**. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan ataupun pembinaan yang khusus ditujukan kepada perempuan tani, karena selama ini program tersebut telah dilaksanakan tapi biasanya kehadiran perempuan tani sifatnya hanya sebagai "pelengkap" saja. Selain pelatihan di bidang pertanian, dapat pula diberikan pelatihan di bidang lainnya guna dijadikan alternatif sumber pendapatan bagi perempuan tani untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.
3. Perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten Konawe dalam hal pemberdayaan perempuan tani. Wujudnya antara lain melalui pendekatan *capacity building* khususnya dalam **dimensi reformasi kelembagaan**, dengan fokus perbaikan sistem serta kebijakan dan regulasi yang dapat lebih berpihak pada perempuan tani. Hal ini harus segera dilakukan karena dengan adanya pemanfaatan teknologi dan peralatan modern di bidang pertanian, maka lambat laun tenaga perempuan tani akan tergantikan bahkan tersingkir. Dengan demikian mereka akan kehi-

langan sumber penghasilan serta pada akhirnya akan menggoyahkan kemandirian ekonomi yang saat ini mereka rasakan lewat keberadaannya dalam kelompok tani.

### Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anonymous. 2001. *Banyak Program tapi Tetap Miskin*. Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta.
- . 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*, Manual Teknis Pemberdayaan Masyarakat, Seri Pemberdayaan Masyarakat. Kerjasama Bappenas, Departemen Kimpraswil, Depdagri dan JBIC, Jakarta.
- . 2004. *Manual Teknis*
- Cook, S. dan Steve Macaulay. 1996. *Perfect Empowerment*. Paloepe Tyas R. (penerjemah). *Pemberdayaan yang Tepat*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 2003. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin*, Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jakarta.
- Grindle, M.S. (Editor). 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*, Harvard Institute for International Development, Boston.
- Jamasy, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*, Penerbit Belantika, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Methods for Development Work and Research: A Guide for Practitioners*. Matheos Nalle (penerjemah). 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Edisi Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moser, C. 1997. *Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs*, World Development 17 (7) 1799-1825.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Schuftan, Claudio. 1996. *The Community Development Dilemma: When are Service Delivery, Capacity Building, Advocacy and Social Mobilisation really Empowering?* Community Development Journal, Vol. 31 (3), July 1996.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Edisi Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.